

**PERAN PENDAMPING DAN KETUA KELOMPOK DALAM PEMANFAATAN DANA
PENDIDIKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TALOK
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO**

Dwi Fitrianingrum

10040254202 (Prodi SI PPKn, FIS, UNESA) doziray@yahoo.com

Totok Suyanto

0004046307 (Prodi SI PPKn, FIS, UNESA) totoksuyantounesa@gmail.com

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang berimbas pada ketidakmampuan dalam pemenuhan biaya pendidikan. PKH memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan dana pendidikan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah RTSM dan mengurangi angka pekerja anak dibawah umur (6-15 tahun) serta mengetahui lebih dalam peran pendamping dan ketua kelompok dalam pemanfaatan dana Pendidikan Program Keluarga Harapan di Desa Talok Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dalam bentuk prosentase. Program Keluarga Harapan dianalisis merujuk pada pendapat tokoh tentang implementasi kebijakan publik. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimasyarakat Indonesia diperlukan suatu kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas Negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan (rencana) program, tetapi juga implementasi program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada kebijakan Program Keluarga Harapan dapat terimplementasi dengan baik diperlukan syarat-syarat yaitu kondisi eksternal (sikap masyarakat), adanya hubungan kausalitas, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman terhadap tujuan, adanya tugas-tugas yang jelas dalam urutan waktu yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang baik.

Kata kunci: Pemanfaatan, Dana PKH

Abstract

Hope Family Program (HFP) is one of the government's efforts in tackling the problem of poverty which gives impact on the inability to fulfill the educational costs. HFP provides cash aid to Very Poor Households (VPH). In return the households are required to meet the requirements related to improving the quality of human resources (HR), namely education and health. This study aims to investigate the effectiveness of the use of Hope Family Program (HFP) education funds in increasing school enrollments of VPH and reduce the number of child laborers under age (6-15 years) as well as insights into the role of mentor and team leader in the utilization of Hope Family Program Education funds in the Talok Village Dlanggu district, Mojokerto. This is descriptive research. The technique of collecting data is through questionnaire, interview, and documentation. Data analysis techniques used in this research is descriptive quantitative in percentage. HFP analyzed referring to the opinion of figure on the implementation of public policy. In solving the problem which is spreading in Indonesian community, it is needed a policy as a realization of the functions and duties of the State and in order to achieve development goals. As a consequence, it requires not only the formulation of (plan) program, but also the implementation of the program in order to achieve the planned objectives. At HFP policy can be implemented correctly through the terms required that is external condition (the attitude of society), the existence of a causal relationship, a relationship of interdependence which is small, an understanding of the purpose, the existence of clear tasks in the proper time sequence, good communication and coordination.

Keywords: Utilization, FHP Fund.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya itu Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang masih membutuhkan pembangunan. Tanpa adanya pembangunan suatu bangsa tidak akan pernah berkembang.

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Menurut Ginandjar Kartasasmita Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1993-1998 menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan yaitu membentuk masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu saja tidak cukup, karena masyarakat yang sejahtera harus pula berkeadilan.

Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat desa yang yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana

dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Suharyanto (2009) keberhasilan pembangunan dapat diukur dari terberantasnya pengangguran, terberantasnya kemiskinan, pemerataan hasil pembangunan dan hasil-hasilnya. Berdasarkan pendapat para ahli tentang keberhasilan pembangunan nyatanya di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena angka pengangguran di Indonesia belum dapat diberantas yang dapat berdampak pula pada kemiskinan. Imbas dari pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang karena tidak memiliki pendapatan.

Jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 7.170.523 orang dengan tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan dari yang belum pernah sekolah sampai lulusan Sekolah Menengah Umum (SMA) cenderung meningkat 1,24% dari 5.568.701 orang per Agustus 2012 menjadi 5.708.992 orang per Februari 2013. Sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai Perguruan Tinggi (PT) angka pengangguran menurun 6,84% dari 1.676.245 orang per Agustus 2012 menjadi 1.461.534 orang per Februari 2013.

Ketidak mampuan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan merupakan imbas dari rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin yang hanya cukup untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan gizi anak kurang mencukupi produktivitas dan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan anak tersebut terperangkap dalam kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah atau setidaknya kurang berprestasi di sekolah. Ada juga sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah.

Dari penjelasan tersebut diperlukan kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan yang didalamnya termuat tujuan pembangunan yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014 yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif. Terkait dengan strategi tersebut, pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, yaitu (a) Klaster I Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga merupakan cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Jenis-jenis program terdiri dari Jamkesmas, PKH, Raskin, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). (b) Klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan yang dilakukan pada wilayah pedesaan, perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal yang berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin. Program dari klaster ini yaitu PNPM. (c) Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yaitu cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Jenis program klaster III yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam penelitian ini kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah termuat dalam klaster I dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, dimulai pada tahun 2007 pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. PKH lebih dimaksudkan

kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

PKH dijalankan sebagai pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat, dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2012-2013 terjadi penambahan kepesertaan tahun 2012 yaitu 906.232 menjadi 1.438.825 pada tahun 2013. Peserta program pendidikan bertambah sebanyak 46,5% (dari 485.023 menjadi 710.660).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tujuan utama yang tertuang dalam buku pedoman PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas (1) meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, (2) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, (4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192.

Tujuan PKH pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi anak-anak RTSM, serta untuk mengurangi angka pekerja anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari

hari efektif sekolah selama sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.

Berbagai strategi peningkatan akses sekolah kini telah tersedia, tetapi angka partisipasi sekolah di Indonesia, khususnya bagi anak-anak RTSM masih belum optimal. Dengan demikian, PKH pendidikan menjanjikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak RTSM dalam mengakses pelayanan pendidikan.

Di Indonesia, penyaluran dana PKH belum secara keseluruhan kesemua wilayah, karena masih dalam tahap uji coba, apabila program ini berhasil mencapai tujuan, maka program ini akan berlangsung secara berkesinambungan menjangkau wilayah-wilayah secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui aspek bidang pendidikan dan kesehatan.

Di Jawa Timur Program Keluarga Harapan (PKH) telah diselenggarakan di beberapa daerah Kabupaten dan Kota salah satunya adalah di Mojokerto. Pada tahun 2009 penerima bantuan PKH terdiri dari 15 Kecamatan, dengan 3 Kecamatan terakhir penerima bantuan PKH yaitu Kecamatan Magersari, Kemlagi dan Prajurit Kulon. Kini pada tahun 2014 penerima bantuan PKH sudah meyeluruh ke 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu Kecamatan Magersari, Prajurit Kulon, Bangsal, Dawar Blandong, Dlanggu, Gedeg, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Sooko, Trawas dan Trowulan. Salah satu kecamatan yang menerima dana Program Keluarga Harapan yaitu kecamatan Dlanggu dengan salah satu desa yaitu Desa Talok.

RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan yaitu mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Untuk mendukung PKH, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Sosial telah membentuk Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen PKH berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping PKH, yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat.

Pada umumnya, pendamping PKH memiliki latar belakang pendidikan sarjana, bahkan ada beberapa berkualifikasi sarjana strata 2. Tugas utama para Pekerja Sosial Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM peserta PKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penjelasan diatas menggambarkan secara umum penggunaan dana pendidikan PKH. Sedangkan penelitian yang dilakukan, yaitu mencoba memfokuskan pada kebijakan penggunaan dana pendidikan PKH yang harusnya di gunakan untuk biaya pendidikan tetapi pada kenyataannya kebutuhan hidup semakin meningkat dan hambatan-hambatan dalam penggunaan dana pendidikan PKH terganjal dengan semakin bertambahnya kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul mengenai "Peran Pendamping dan Ketua Kelompok dalam Pemanfaatan Penggunaan Dana Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto".

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana peran pendamping dan ketua kelompok PKH dalam pemanfaatan dana pendidikan PKH di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto? (2) Bagaimana keefektifan penggunaan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah RTSM dan mengurangi angka pekerja anak di bawah umur?

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran pendamping dan ketua kelompok dalam pemanfaatan dana Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talok Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. (2) Untuk mengetahui keefektifan penggunaan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah RTSM dan mengurangi angka pekerja anak dibawah umur.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat itikad untuk mengemas penanganan masalah kemiskinan ini secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan profesionalisme. Disadari betapa kompleksnya permasalahan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga dalam penanganannya, tidak hanya mengandalkan rasa belas kasihan semata, namun perlu diarahkan secara sistematis, profesional dan berkesinambungan. Selanjutnya harus diikuti dengan langkah pemberdayaan dalam penanganan kemiskinan guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang.

Pendekatan pemberdayaan sosial adalah salah satu pendekatan dari sekian banyak pendekatan profesi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial. Pemberdayaan sosial lebih ditonjolkan karena didalamnya terkandung dua aspek yakni penentuan nasib sendiri dimana si miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya dan pekerja sosial hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap kelayan/masyarakat pelaku pembangunan.

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan social yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan, kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga/lembaga sosial. Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (a) perubahan sikap, masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normative, (b) peningkatan partisipasi sosial, masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, (c) solidaritas sosial, pemberdayaan social mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama, (d) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, melalui pemberdayaan social diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin, (e) Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin, lembaga keluarga miskin juga menjadi sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin, (f) Perubahan orientasi nilai budaya, dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis,

malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini kebijakan publik yang dimaksud yaitu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian social yang mengeluarkan sebuah program yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Keluarga Harapan.

Kebijakan publik tidak akan memberikan dampak sesuai yang diharapkan jika tidak diimplementasikan. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65) menyatakan bahwa Implementasi menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikan kebijakan tersebut mapupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting, karena melalui tahapan ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian suatu tujuan dari kebijakan. Hal tersebut dipertegas oleh Chief J.O Udoji dalam Agustino (2008:140) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dari dari proses kebijakan public, karena kebijakan public yang sudah di rancang secara matang tidak ada gunanya apabila tidak adanya tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan public tersebut. Merujuk pada Wahab (1997), agar suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik diperlukan syarat-syarat yaitu kondisi eksternal (sikap masyarakat), ketersediaan waktu dan sumber daya, sinergisitas sumber daya yang diperlukan, adanya hubungan kausalitas, kesederhanaan mata rantai penghubung, hubungan saling ketergantungan kecil, pemahaman terhadap

tujuan, adanya tugas-tugas yang jelas dalam urutan waktu yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang baik.

Menurut model Implementasi Kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bias dicapai. Oleh karena itu untuk bisa mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Tetapi perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Teori Implementasi menurut Edward III dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan public diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure).

Pada Program Keluarga Harapan, implementasi yang dimaksud yaitu membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok keluarga sangat miskin. Dalam jangka pendek. Bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang pada bidang pendidikan dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya dan diharapkan mampu memutus kemiskinan antar generasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai salah satu prosedur pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang aktual dan diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan, subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Penelitian deskriptif menjelaskan suatu hubungan atau pengaruh antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keefektifan dalam pemanfaatan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode angket sedangkan wawancara digunakan sebagai data pelengkap atau penjelas sesudah angket. Untuk mengetahui keefektifan dalam pemanfaatan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan analisis regresi linier sederhana.

Lokasi yang digunakan untuk mengadakan penelitian yaitu Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Adapun alasan dalam pemilihan tempat penelitian yaitu Desa Talok merupakan salah satu desa yang memiliki banyak penduduk miskin di kecamatan Dlanggu dengan jumlah total penduduk yaitu 4226 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2183 dan perempuan berjumlah 2043 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1084 penduduk miskin sebanyak 484 jiwa dan penerima dana Program Keluarga harapan sebanyak 71 keluarga sangat miskin. Sedangkan waktu penelitian adalah waktu yang diperlukan selama kegiatan penelitian, dimulai dari pengajuan judul sampai penyusunan laporan hasil penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto yakni sebanyak 78 Kepala Keluarga (KK). Arikunto (2006:131) mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Peneliti mengambil sampel menggunakan teknik sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Dari keseluruhan populasi yang berjumlah 78 RTSM yang terdiri dari 67 penerima bidang pendidikan dan 11 penerima bidang kesehatan. Peneliti memilih sampel dari bidang pendidikan yang berjumlah 67 RTSM.

Untuk menghindari salah penafsiran dan memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap variable yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan mengenai definisi operasional. Adapun definisi variabel penelitian ini adalah pemanfaatan dana pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemanfaatan yang dimaksud adalah ketepatan

penggunaan dana PKH untuk pendidikan. Adapun sub variabelnya antara lain yaitu (1) Peran pendamping dan ketua kelompok merupakan aktivitas dari tugas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga yang terkait. Adapun indikatornya antara lain (a) Informasi terkait PKH, (b) Penyaluran dana PKH, (c) Pelaksana PKH, (d) Evaluasi kinerja pelaksana PKH. (2) Efektivitas penggunaan dana pendidikan PKH yaitu terkait Pemanfaatan dana PKH.

Untuk memperoleh data-data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Angket pada penelitian ini menggunakan angket semi terbuka dan semi tertutup, dimana angket tersebut sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih disertai dengan penjelasan apabila dibutuhkan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui jawaban rumusan masalah nomor 1 dan 2. (2) Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memberi informasi dari seseorang atau sekelompok orang Suharsimi Arikunto (2010:270). Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti selanjutnya wawancara berlangsung mengalir mengikuti situasi yang ada. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data melengkapi data tambahan yang dapat menunjang penelitian meliputi data dengan tujuan memperoleh informasi gambaran tentang pelaksanaan PKH serta peran pendamping dan ketua kelompok dalam penyaluran dana pendidikan di desa Talok. (3) Dokumentasi digunakan untuk mencari data atau arsip baik berupa catatan, transkrip data jumlah penduduk miskin yang ada di Desa Talok beserta jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pihak desa.

Sedangkan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana tujuan dari instrument ini adalah agar dapat memperjelas dan memperkuat penelitian. Instrument dalam penelitian ini adalah teknik angket, teknik wawancara dan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan menyebar angket sehingga dapat memperkuat data penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dalam bentuk prosentase yaitu data dari penelitian harus dianalisis agar teruji kebenarannya. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan sebuah teknik pengelolaan data, dimana rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap satu variabel

atau lebih (sugiyono, 2009:35), yang kemudian hasilnya diprosentasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = x 100\%$$

Keterangan:

P = Hasil akhir dalam prosentase

n = Jumlah jawaban responden per option

N = Jumlah seluruh responden

Setelah menentukan skor jawaban dari angket maka diperlukan penentuan kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaian hasil dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1. Kriteria Penilaian untuk Penggunaan Dana Pendidikan PKH

No.	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
1	0% - 25%	Rendah
2	26% - 50%	Sedang
3	51% - 75%	Tinggi
4	76% - 100%	Sangat tinggi

Perhitungan Angket

Hasil Perhitungan Prosentase Setiap Sub Indikator Angket Guna Mengetahui peran pendamping dan ketua kelompok dalam pemanfaatan dana pendidikan PKH serta penggunaan dana program keluarga harapan (PKH) di desa Talok.

Tabel 2. Hasil Kinerja Pelaksana PKH

Pertanyaan	Pendam ping	Ketua kelompok	Jumlah
1. Memberikan informasi tentang PKH	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
2. Sosialisasi tentang PKH	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
3. Memberikan nasehat	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
4. Menerima keluhan tentang PKH	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
5. Menginformasikan pencairan dana PKH	0 (0%)	67 (100%)	67 (100%)
6. Menginformasikan berita tentang PKH	0 (0%)	67 (100%)	67 (100%)
7. Menyelenggarakan	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)

pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH			(%)
8. Mendampingi proses pembayaran	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)

Pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dan ketua kelompok berbeda. Peserta PKH yang berjumlah 67 atau 100% menjawab berdasarkan angket tersebut peran pendamping adalah Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH, Mendampingi proses pembayaran, Memberikan informasi tentang PKH, Sosialisasi tentang PKH, Memberikan nasehat, Menerima keluhan tentang PKH. Sedangkan peran dari ketua kelompok yaitu Menginformasikan pencairan dana PKH dan Menginformasikan berita tentang PKH.

Pada pertemuan awal ini pendamping bertugas membantu penerima bantuan PKH dalam mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir kepada UPPKH Kabupaten/Kota. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah. Mengingat pertemuan awal ini sangat penting, maka pendamping harus mendampingi dalam proses pengisian data serta dalam penyampaian informasi dari pihak yang bersangkutan kepada penerima bantuan PKH.

Sedangkan kinerja pada ketua kelompok dinilai kurang berperan dalam pelaksanaan PKH karena ketua kelompok bukan pelaksana inti dari PKH melainkan membantu pendamping dalam hal kelancaran komunikasi antara peserta PKH dan pendamping. Pada proses pembayaran, pendamping bekerjasama dengan petugas kantor pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima bantuan PKH yang terdaftar sebagai kelompok yang didampingi. Selanjutnya pendamping menginformasikan kepada ketua kelompok mengenai jadwal dan memastikan pembayaran yang diterima peserta PKH tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3. Hasil Pemanfaatan Dana PKH di desa Talok

Deskripsi	Iya	Tidak	Jumlah
Penggunaan dana PKH langsung untuk kebutuhan sekolah.			
a. Kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan	53 (79,	14 (20,	67 (100%)

	10%)	90%)	
b. Penggunaan PKH untuk kebutuhan pendidikan	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
c. Untuk membiayai sekolah	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
d. Membayar iuran/SPP sekolah	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
e. Membeli peralatan sekolah	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
f. Membeli seragam	37 (55, 22%)	30 (44, 78%)	67 (100%)
g. Membeli buku pelajaran	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
h. Memberi uang saku anak	67 (100%)	0 (0%)	67 (100%)
Penggunaan dana PKH tidak langsung untuk kebutuhan sekolah			
a. Kecukupan dalam pemenuhan sehari-hari	0 (0%)	67 (100%)	67 (100%)
b. Penggunaan dana PKH untuk kebutuhan sehari-hari	0 (0%)	67 (100%)	67 (100%)
c. Membeli baju	7 (10, 45%)	60 (89, 55%)	67 (100%)
d. Membeli obat	21 (31, 34%)	46 (68, 66%)	67 (100%)
e. Membeli beras	11 (16, 42%)	56 (83, 58%)	67 (100%)
f. Membayar pinjaman	0 (0%)	67 (100%)	67 (100%)

Dari tabel 3 pada kategori penggunaan dana PKH secara langsung untuk kebutuhan sekolah dapat dijelaskan bahwa dari pernyataan nomor 11 yakni kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan pada responden penerima bantuan PKH bidang pendidikan desa Talok dari keseluruhan responden yang berjumlah 67 dengan prosentase 100% sebanyak 79, 10% menyatakan iya bahwa bantuan PKH yang diberikan cukup dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, dan 20, 90% mengatakan tidak cukup untuk pemenuhan pendidikan.

Ketidakcukupan peserta PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikan karena ketidaksamaan jumlah biaya PKH yang didapat antara keluarga satu dan yang lain, berbeda tingkat kebutuhan tiap-tiap keluarga, dan berbedanya cara penggunaan tiap-tiap keluarga. Pada pernyataan berikutnya penggunaan PKH untuk pendidikan, untuk membiayai sekolah, membayar SPP/iuran sekolah, membeli buku pelajaran dan memberi uang saku anak didapat hasil yang sama dari keseluruhan responden yang berjumlah 67 dengan prosentase 100% sebanyak 67 responden dengan prosesntase 100% menjawab iya dan 0% menjawab tidak. Berdasarkan hasil angket tersebut diketahui bahwa bantuan yang diberikan kepada peserta PKH digunakan untuk kebutuhan sekolah misalnya membiayai sekolah, membayar SPP/iuran sekolah, membeli buku pelajaran hingga memberi uang saku anak menggunakan bantuan yang diberikan oleh PKH.

Sedangkan pada pernyataan membeli seragam didapat hasil 55, 22% atau 37 orang dari 67 responden menjawab iya sedangkan 44, 78% atau 30 responden menjawab tidak. Hasil wawancara yang didapat untuk memperkuat pernyataan tentang penggunaan bantuan PKH untuk membeli seragam didapat hasil bahwa penggunaan bantuan PKH tidak untuk membeli seragam karena mereka beranggapan bahwa tidak setiap bulan ataupun setiap tahun digunakan untuk membeli seragam apalagi bagi peserta PKH yang mempunyai anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya pada saat pertama kali masuk SMP mereka gunakan dana PKH untuk membeli seragam dan pada tahun berikutnya bantuan tersebut tidak lagi digunakan karena waktu untuk menempuh pembelajaran di SMP 3 tahun, maka mereka berfikir seragam yang dipakai anak mereka masih dalam keadaan layak.

Pada kategori pemanfaatan dana PKH tidak langsung untuk kebutuhan sekolah pada pernyataan tentang kecukupan dalam pemenuhan sehari-hari, dan penggunaan dana PKH untuk kebutuhan sehari-hari didapat hasil dari keseluruhan responden yang berjumlah 67 dengan prosentase 100% pada pernyataan tersebut hasil yang didapat yaitu keseluruhan dari responden yang berjumlah 67 menjawab tidak dengan prosentase 100%. Sedangkan dari pernyataan nomor 20 yaitu penggunaan dana PKH untuk membeli baju pada responden penerima bantuan PKH bidang pendidikan desa Talok sebanyak 7 responden atau 10,45% menyatakan iya menggunakan dana PKH untuk membeli baju, sedangkan 60 responden dari total keseluruhan 67

responden menjawab tidak menggunakan dana PKH untuk membeli baju dengan prosentase 89,55%.

Pada indikator selanjutnya yaitu pernyataan nomor 22 penggunaan dana PKH untuk membeli obat pada responden penerima bantuan PKH bidang pendidikan desa Talok sebanyak 21 responden atau 31,34% menyatakan iya mempergunakan dana PKH untuk membeli obat dan 46 responden dengan prosentase 68,66 menyatakan tidak mempergunakan dana PKH untuk membeli obat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden diketahui bahwa alasan mereka mempergunakan dana PKH untuk membeli obat yaitu karena kesehatan nomor satu. Kalau mereka sakit dalam hal ini mencakup orangtua dan si anak maka orangtua tidak bias mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi kalau anak yang sakit maka tidak akan maksimal dalam memperoleh pelajaran karena mereka akan ketinggalan pelajaran apabila tidak masuk sekolah. Ini yang membuat mereka lebih mementingkan kesehatan.

Sedangkan pada pernyataan nomor 24 pernyataan yang bersifat negatif yaitu membeli beras sebanyak 11 responden menyatakan iya mempergunakan dana PKH untuk membeli beras dengan prosentase 16,42 dan 56 responden menyatakan tidak mempergunakan dana PKH untuk membeli beras dengan prosentase sebesar 83,58%. Pada indikator ini responden beralasan bahwa membeli beras termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi mereka tidak bisa makan dan anak-anak tidak dapat belajar secara maksimal karena harus menanggung lapar pada saat proses pembelajaran.

PEMBAHASAN

Munculnya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan publik dibidang perlindungan social tidak begitu saja langsung muncul. Program Keluarga Harapan merupakan sebuah kebijakan program yang dirumuskan Pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan penduduk Indonesia. Untuk itu merujuk pada Nugroho (2004), untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang dimasyarakat Indonesia diperlukan suatu kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas Negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan (rencana) program, tetapi juga implementasi program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus diimplementasikan

agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan (Tachjan, 2006). Itulah sebabnya implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dan dalam urutan waktu tertentu.

Merujuk pada Wahab (1997), pada kebijakan Program Keluarga Harapan dapat terimplementasi dengan baik diperlukan syarat-syarat yaitu Kondisi eksternal (sikap masyarakat), Adanya hubungan kausalitas, Hubungan saling ketergantungan kecil, Pemahaman terhadap tujuan, Adanya tugas-tugas yang jelas dalam urutan waktu yang tepat, Komunikasi dan koordinasi yang baik.

Kondisi eksternal (sikap masyarakat) dalam PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial yakni program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, atau pelayanan kesejahteraan yang diberikan kepada keluarga miskin yang mempunyai anak usia SD dan SMP, ibu hamil atau nifas dan anak balita. Pada awal pelaksanaannya masyarakat desa Talok tidak mengetahui apa itu PKH. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka mendapat bantuan dari pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan.

Pada pelaksanaan sosialisasi awal, tidak seluruh peserta PKH ikut dalam sosialisasi karena terganjal kesibukan dan berfikir bahwa bantuan PKH sama dengan bantuan sosial pada umumnya. Tetapi setelah pemberian sosialisasi tahap awal tentang apa itu PKH, tujuan, kewajiban sampai syarat yang harus dipenuhi baru mereka tahu kalau PKH ini tidak sama dengan bantuan sosial lainnya karena PKH adalah bantuan sosial dengan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Adapun syarat yang dimaksud yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar, membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak dan untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil

Setelah adanya sosialisasi tersebut dan peserta PKH memahami tentang PKH, peserta PKH desa Talok menerima keberlangsungan PKH di desa Talok

dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan dari PKH. Hal ini terbukti dari keterlibatan peserta dalam mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan pendamping selama sebulan sekali.

Dampak positif mereka rasakan dengan adanya bantuan PKH dapat meringankan biaya pendidikan dan dapat meningkatkan partisipasi anak karena harus memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH yaitu mengikuti proses pembelajaran minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan.

Dengan adanya kewajiban tersebut menjadikan pacuan orangtua agar lebih aktif menyekolahkan anak sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban yang diberikan PKH pendidikan. Peserta PKH menilai PKH telah sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Talok. Bentuk partisipasi peserta PKH pada program ini yaitu dalam kegiatan yang dilakukan pendamping seriap pertemuan bulanan yang diadakan, peserta PKH aktif mengikuti kegiatan tersebut. Peserta PKH saling berbagi informasi antar peserta PKH lainnya seputar PKH. Disamping itu, peserta PKH telah memenuhi kewajiban sebagai peserta PKH pendidikan dengan mendaftarkan anaknya ke SD dan SMP serta mengikuti kehadiran disekolah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Adanya hubungan kausalitas pada keberhasilan kebijakan atau program dapat dilihat dari proses implementasi dan hasilnya. Pada proses program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Salah satu usaha dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengeluarkan program yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah salah satu bentuk dari kebijakan dibidang perlindungan sosial yang merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaan kebijakan adanya hubungan sebab akibat perlu untuk dipertanyakan, karena apabila suatu kebijakan tidak mempunyai akibat yang baik maka kebijakan tersebut tidak patut

untuk diteruskan. Pada pelaksanaan PKH desa Talok Penentuan peserta PKH ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, setelah memperoleh data RTSM dari Badan Pusat Statistik.

Data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) digunakan sebagai data awal yang kemudian diolah sebagai dasar penentuan sasaran RTSM Penerima PKH. Dalam menentukan perhitungan besaran bantuan yang diberikan kepada RTSM didasarkan pada komponen syarat kepesertaan PKH, yaitu adanya Ibu hamil, Ibu menyusui, adanya anak balita, anak sekolah dasar dan SLTP.

Tujuan jangka pendek PKH adalah untuk memberikan efek pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban biaya kesehatan Ibu hamil, Ibu menyusui dan anak balita serta biaya pendidikan anak sekolah. Pada penelitian ini sebab munculnya Program Keluarga Harapan yaitu untuk menanggulangi kemiskinan yang dapat berimbas pada pendidikan, karena apabila masyarakat tersebut kekurangan dalam kecukupan sehari-hari imbasnya yaitu pendidikan anak menjadi hal yang tidak penting bagi apalagi pendidikan sekarang ini tidaklah murah. Akibatnya dikeluarkan program ini pada peserta PKH desa Talok yaitu tercukupinya biaya pendidikan anak dan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa Talok karena biaya pendidikan sudah tercukupi sehingga mereka hanya perlu mencari nafkah untuk kecukupan kebutuhan sehari-hari.

Hubungan saling ketergantungan kecil dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan desa Talok terdapat beberapa hubungan yang saling berkesinambungan yaitu antara peseta PKH dan pemerintah, peseta PKH dan pendamping serta pendamping dan ketua kelompok. Pada hubungan antara peseta PKH dengan pemerintah didasari atas bantuan PKH yang diberikan pemerintah kepada peseta PKH dalam memenuhi kebutuhan pendidikan peseta PKH.

Dalam hal ini ada kewajiban yang harus dilakukan peseta PKH agar keberlangsungan hubungan ini tetap terjalin secara terus menerus yaitu menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar. Hubungan selanjutnya yaitu antara peseta PKH dan pendamping dimana pendamping sebagai pemberi informasi terkait dengan PKH serta mendampingi selama pelaksanaan PKH berlangsung. Hubungan yang terakhir yaitu pendamping dan ketua kelompok dimana ketua kelompok disini berperan dalam menjembatani antara pendamping dengan peseta PKH. Dalam hal ini hubungan tersebut harus

tetap terjaga untuk keberlangsungan pelaksanaan PKH maka dari itu setiap pelaksana saling membutuhkan antar satu dan yang lain.

Pemahaman terhadap tujuan secara umum PKH yaitu untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tetapi secara khusus, PKH sebenarnya bertujuan untuk Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM, Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

Pada pelaksanaan PKH di desa Talok nyatanya tidak semua dari peserta PKH mengetahui dengan jelas tujuan dari program PKH. Sebagian dari peseta PKH hanya mengetahui tujuan secara umumnya yaitu untuk pendidikan anak usia SD dan SMP. Meskipun demikian, peserta mampu menjalankan PKH sesuai aturan yang telah ditetapkan. Terbukti selama ini tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan pendamping selama mendampingi pelaksanaan PKH di desa Talok.

Adanya tugas-tugas yang jelas dalam urutan waktu yang tepat pada pelaksana PKH desa Talok masing-masing pelaksana program memiliki tugas masing-masing dari pendamping, ketua kelompok sampai peseta PKH. Tugas pendamping yaitu menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peseta PKH, menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peseta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum, mengelompokkan peseta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peseta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan, memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peseta PKH (selanjutnya disebut Ketua Kelompok saja), membantu peseta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.

Pada pelaksanaannya pendamping sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kelancaraan pelaksanaan PKH dari tahun 2008 sampai 2014 ini tidak adanya masalah yang menghambat berlangsungnya PKH ini. Setiap ada masalah bias diselesaikan pendamping tentunya dengan partisipasi peseta PKH. Berdasarkan data dilapangan, pendamping selalu bersikap ramah dan sabar dalam memberikan informasi terkait PKH serta

menampung keluhan-keluhan terkait PKH. Selanjutnya tugas ketua kelompok yaitu sebagai panjangan tangan dari pendamping yang menjembatani antara pendamping dan peserta PKH.

Ketua kelompok sebagai pemberi informasi ketika pencairan dana PKH keluar dan memberikan informasi dari pendamping ke peserta PKH terkait dengan PKH sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pemerataan informasi yang diberikan ketua kelompok kepada peserta PKH sehingga peserta PKH dapat mengetahui informasi terkait PKH secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tugas peserta PKH yaitu menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar. Selain itu peserta PKH juga bertugas untuk dapat mempergunakan bantuan PKH sesuai dengan aturan dan semaksimal mungkin.

Berdasarkan data lapangan, nyatanya masih ada peserta PKH yang mempergunakan bantuan PKH tidak untuk keperluan pendidikan. Ada yang mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan alasan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan yang penting juga. Selama keberlangsungan pelaksanaan PKH sampai 2014 ini masih ada yang mempergunakan bantuan PKH untuk membeli keperluan di luar kepentingan pendidikan dan pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena pendamping PKH desa Talok pernah member sanksi pada salah satu warga yang mempergunakan oleh dana PKH untuk membeli emas. Tetapi terlepas dari itu, peserta PKH tetap memprioritaskan pendidikan sebagai urutan pertama meskipun kadang mereka mempergunakan bantuan tersebut tidak untuk pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus tentang keterlambatan orangtua dalam membayar biaya pendidikan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi dan koordinasi yang baik pada pelaksanaan PKH, informasi terkait kebijakan publik tidak hanya diberitahukan kepada pelaksana saja tetapi pada pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat peserta PKH. Masyarakat berhak mengetahui dibalik maksud dari lahirnya kebijakan tersebut serta bagaimana mereka ikut berperan dalam dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penyaluran informasi dari pendamping kepada layanan pendidikan, peserta PKH dan aparat desa berjalan lancar.

Sebagai pendamping desa Talok, bapak Effendi memberikan penjelasan dengan jelas tidak melalui

perantara melainkan langsung bertatap muka. Pendamping melakukan sosialisasi kepada layanan pendidikan dengan pada saat pertemuan awal yang dikumpulkan jadi satu di Balai Desa Talok. Tidak hanya berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi pendamping juga melakukan kunjungan kepada sekolah-sekolah terkait maksud dari program PKH salah satunya terkait dengan tanggung jawab pihak sekolah dalam pelaksanaan PKH. Penyampaian informasi kepada peserta PKH dilakukan dengan mengumpulkan peserta PKH di Balai Desa Talok.

Awal pertemuan pendamping menjelaskan terkait PKH yang meliputi apa itu PKH, siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, tujuan, kewajiban sampai sanksi yang diberikan kepada peserta PKH apabila melanggar kewajiban dari PKH. Tugas pendamping selanjutnya yaitu mendampingi peserta PKH sampai program ini berakhir dan melakukan pemutakhiran yaitu mendapatkan data baru mengenai status RTSM tersebut. Perubahan terjadi jika ada anak dari RTSM naik kelas/lulus dan kemudian ibu hamil yang melahirkan.

Berdasarkan informasi di lapangan menyatakan bahwa informasi yang diberikan pendamping sama. Misalnya dalam memberikan informasi kepada dusun satu dengan dusun yang lain tidak ada perbedaan mengenai penyaluran waktu penyaluran dana sampai informasi terbaru terkait PKH. Pendamping dalam program ini berusaha memberikan informasi yang konsisten untuk peserta PKH, petugas layanan pendidikan dan pihak-pihak yang terkait. Selain itu dalam penyampaian komunikasi pendamping dibantu ketua kelompok. Untuk mempersingkat waktu dan memudahkan pendamping dalam penyampaian informasi, maka terlebih dahulu pendamping memberika informasi kepada ketua kelompok masing-masing dusun yang selanjutnya ketua kelompok tiap-tiap dusun menyampaikan informasi tersebut kepada peserta PKH. Tidak hanya itu, ketika perkumpulan besar tiap beberapa bulan sekali ketua kelompok juga bertugas untuk mengumpulkan peserta PKH ke balai desa yang selanjutnya dibalai desa diberi arahan oleh pendamping terkait dengan PKH.

Dalam penelitian ini untuk melihat keberhasilan Program Keluarga Harapan di Desa Talok selain menggunakan pendapat ahli juga menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Edward III dimana untuk mencapai keberhasilan tujuan dalam Program Keluarga Harapan terdapat dua variabel yang menentukan antara lain, variabel komunikasi, variabel sumber daya sebagai berikut.

Variabel Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan pelaku yang terlibat dalam suatu kebijakan dilihat dari sikap dan perilaku para pelaksana program. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pihak yang terlibat yaitu Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat yang merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program yaitu Kementerian social bertugas melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu UPPKH Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mengawasi kinerja pendamping.

Pihak kuncinya yaitu terletak pada pendamping yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima bantuan dalam memenuhi komitmennya. Pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Talok komunikasi yang dilakukan tidak hanya kepada pelaksana program saja tetapi pendamping juga melakukan komunikasi antara peserta PKH.

Untuk kelancaran pelaksanaan PKH di desa Talok, komunikasi melalui pemberian-pemberian informasi dari UPPKH Kabupaten kepada pendamping melalui pelaksanaan diklat yang di distribusikan kepada peserta PKH dengan cara pemberian sosialisasi terkait PKH. Penyampaian sosialisasi dilakukan di Balai Desa Talok dengan terlebih dahulu mendata siapa saja yang berhak mendapat bantuan PKH oleh perangkat desa Talok yang selanjutnya peserta PKH dikumpulkan menjadi satu di Balai desa Talok untuk pemberian informasi awal.

Komunikasi juga dilakukan pendamping dengan perangkat desa talok dan layanan pendidikan tempat penerima bantuan PKH bersekolah. Pendamping melakukan sosialisasi kepada perangkat desa Talok untuk memudahkan dalam proses pendataan awal penerima bantuan PKH. Pendamping bekerjasama dengan perangkat desa talok untuk mensurvei Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang layak untuk mendapatkan bantuan PKH dengan tujuan meminimalisir ketidak tepatan sasaran penerima bantuan PKH. Komunikasi dilakukan pendamping kepada layanan pendidikan dengan melakukan sosialisasi kepada layanan pendidikan pada

pertemuan awal yang dilakukan di Balai Desa Talok. Tidak hanya berhenti pada pertemuan awal saja, tetapi pendamping juga melakukan kunjungan kepada sekolah-sekolah terkait maksud dari program PKH salah satunya yaitu tanggung jawab pihak sekolah dalam pelaksanaan PKH.

Awal pertemuan pendamping dengan peserta PKH menjelaskan terkait PKH yang meliputi apa itu PKH, siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, tujuan, kewajiban sampai sanksi yang diberikan kepada peserta PKH apabila melanggar kewajiban dari PKH. Tugas pendamping selanjutnya yaitu mendampingi peserta PKH sampai program ini berakhir dan melakukan pemutakhiran yaitu mendapatkan data baru mengenai status RTSM tersebut. Perubahan terjadi jika ada anak dari RTSM naik kelas/lulus dan kemudian ibu hamil yang melahirkan. Pada pelaksanaannya pendamping tidak bekerja sendiri dalam pemberian informasi terkait PKH tetapi dibantu oleh ketua kelompok yang bertugas menjembatani antara pendamping dengan peserta PKH.

Penyampaian sosialisasi PKH yang dilakukan pendamping kepada peserta PKH tidak berjalan mulus karena ada kendala seperti ketidak hadiran peserta PKH pada saat sosialisasi dan kurang pahamiya peserta PKH terhadap apa yang dijelaskan pendamping tetapi pendamping dengan telatennya memberikan informasi PKH terutama kepada peserta PKH yang belum paham. Pada saat itulah tugas ketua berfungsi yaitu memberikan informasi kepada peserta PKH yang tidak dapat hadir serta sebagai panjangan tangan dari pendamping dalam penyampaian informasi terbaru kepada peserta PKH terkait pencairan dana dan jadwal perkumpulan yang dilakukan tiga bulan sekali.

Variabel Sumber Manusia pada Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Pada pelasaannya, Sumber Daya Manusia sebagai pendamping PKH diambil dari pegawai Kecamatan Dlanggu yang sudah mengabdikan selama kurang lebih enam tahun dari lingkup luar PNS.

Pemilihan pendamping dilakukan secara professional yang langsung dilakukan oleh pihak pelaksana daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam

melakuka tugas sebagai pendamping desa Talok, Bapak Effendi profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah absennya Bapak Effendi dalam perkumpulan yang dilakukan tiga bulan sekali. Selain itu dalam pemahamannya tentang PKH, Bapak Effendi juga berpengalaman dalam menghadapi peserta PKH yang sulit diatur dan susah dalam memahami apa yang di jelaskan pendamping. Tetapi, dalam pelaksanaan tugas masih ada tugas yang jarang dilaksanakan pendamping yaitu melakukan kunjungan kepada peserta PKH. Tidak meratanya kunjungan dan melaksanakan kunjungan hanya diawal pelaksanaan PKH ini membuat peserta PKH menjadi kurang terkontrol dalam menggunakan bantuan PKH.

Berdasarkan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara, terbukti masih adanya peserta PKH yang menggunakan bantuan PKH untuk menggunakan keperluan lain diluar keperluan pendidikan. Hal itu dilakukan peserta PKH karena tuntutan kebutuhan yang semakin banyak tetapi tidak ada dana dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya dana pendidikan yang seharusnya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan menjadi ganda pemanfaatnya selain untuk pendidikan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pemantauan dalam penggunaan dana PKH dilakukan pendamping melalui sekolah-sekolah tempat penerima bantuan PKH bersekolah apakah ada tunggakan biaya sekolah atau tidak. Pacuan ini yang digunakan pendamping untuk melihat penggunaan bantuan PKH yang diberikan. Selagi biaya pendidikan tidak terjadi penunggakan dan kekurangan itu berarti peserta PKH tepat dalam menggunakan bantuan PKH.

Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Dalam pelaksanaannya peralatan yang diperoleh pendamping adalah kantor sekretariat yang berada di Kecamatan Dlanggu, kamera digital, mesin ketik dan speaker. Untuk masalah fasilitas untuk peserta PKH terdapat sedikit masalah yaitu pada lokasi atau sarana tempat untuk mengambil uang bantuan PKH kurang memadai.

Pengambilan uang bantuan dulu dilakukan di kantor pos tetapi karena banyaknya peserta PKH yang mendapat bantuan yang tidak seimbang dengan sempitnya wilayah kantor pos, pengambilan uang bantuan PKH dipindahkan ke Kecamatan untuk menghindari desakan yang membuat peserta PKH pingsan ataupun sakit.

Sedangkan kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pendamping mempunyai hak untuk mengarahkan penggunaan bantuan PKH dan juga memberikan sanksi apabila ada peserta PKH yang melanggar aturan dalam pelaksanaan PKH. Dalam pelaksanaan PKH di desa Talok pernah terjadi kasus yang berhubungan dengan wewenang yang dimiliki pendamping. Pendamping pernah memergoki peserta PKH menggunakan bantuan PKH untuk membeli emas. Pada saat itu pendamping memberikan peringatan kepada peserta PKH untuk tidak menggunakan dana PKH untuk keperluan diluar pendidikan apalagi untuk membeli emas. Untuk member efek jera maka pendamping member sanksi yaitu memotong 10% dana PKH.

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini diberikan penjelasan kepada pelaksana PKH agar memahami dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban maupun kewenangannya. Informasi terkait PKH diperoleh pendamping melalui diklat yang diberikan UPPKH Kabupaten. Selain itu pendamping juga memperoleh buku pedoman pelaksanaan PKH untuk mempermudah dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Informasi dan pengetahuan tentang PKH yang dimiliki pendamping selanjutnya dibagikan kepada layanan pendidikan dan peserta PKH. Pemberian informasi dipusatkan di Balai Desa Talok.

Pemberian informasi kepada peserta PKH tidak hanya dilakukan satu kali tetapi tiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh pendamping. Pada pemberian informasi awal tentang PKH, tidak semuanya dari peserta PKH mengikutinya yang selanjutnya ketua kelompoklah menyampaikan kepada peserta PKH yang tidak hadir. Hal itu tidak menjadi hambatan dalam pemberian informasi pada pertemuan berikutnya karena pendamping bekerjasama dengan ketua kelompok dalam pelaksanaan PKH di desa talok agar berjalan sesuai yang diharapkan.

Pada pendanaan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan membiayai operasional implementasi kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada program ini dana yang digunakan berasal dari APBN yang meliputi dana bantuan maupun dana operasional lainnya. Upah yang

diberikan kepada pelaksana program ini berasal dari pusat melalui rekening para pelaksana termasuk uang bantuan PKH juga langsung dari pusat melalui kantor pos pada tiap-tiap Kecamatan. Pendanaan PKH tidak terlepas dari dana operasional yang digunakan untuk pendidikan. Ketepatan penggunaan dana menjadi bagian dalam terwujudnya tujuan PKH. Apabila penggunaannya sesuai aturan untuk pendidikan maka, pelaksanaan pembelajaran disekolah menjadi lancar dan maksimal.

Namun kenyataan dilapangan, dana operasional yang harusnya untuk pendidikan berfungsi ganda tidak hanya untuk pendidikan saja melainkan untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tidak semua peserta PKH menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, prioritas yang diutamakan peserta PKH yaitu untuk pendidikan karena kewajiban utama peserta PKH yaitu menyekolahkan anak usia SD dan SMP dan aktif hadir minimal 85% dari hari efektif belajar satu bulan. Dengan mematuhi kewajiban sebagai peserta PKH berdampak pada meningkatnya angka partisipasi sekolah anak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 4, maka dapat disimpulkan (1) Pendamping dan ketua kelompok berperan dalam berlangsungnya PKH dari mulai tahap awal pemberian informasi sampai pemberian nasehat dan masukan terkait PKH. Pendamping tidak hanya mendampingi, melainkan sebagai mediator dan fasilitator antara penerima dana PKH dengan pemerintah yang harapannya kelak penerima bantuan PKH bisa lebih mandiri dan terbebas dari rantai kemiskinan, serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusianya. Selain itu, pendamping juga memiliki peran sebagai pekerja sosial (*social working*). Disisi lain peran ketua kelompok bertugas sebagai jembatan penghubung antara penerima dana PKH dengan pendamping. Ketua kelompok berperan sebagai wakil dari peserta PKH apabila peserta PKH tidak dapat menyampaikan langsung keluh kesah mereka, maka mereka bisa melalui ketua kelompok terlebih dahulu yang selanjutnya akan disampaikan kepada pendamping. (2) Penggunaan dana PKH oleh peserta PKH bidang pendidikan di desa Talok dibedakan menjadi dua yaitu penggunaan dana PKH secara lnsung untuk kebutuhan sekolah dan penggunaan tidak langsung untuk kebutuhan sekolah. Dengan mempergunakan dana PKH untuk pendidikan peserta PKH sadar akan

pentingnya pendidikan dengan mengutamakan penggunaan dana PKH secara langsung untuk kebutuhan sekolah. Berdasarkan kriteria penilaian dari Arikunto, hal ini dinilai efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka pekerja anak karena semakin tingginya kesadaran akan pendidikan, orangtua menjadi lebih aktif dalam membimbing anaknya untuk mengikuti pelajaran dengan hadir selama proses pembelajaran berlangsung dikarenakan kewajiban bagi peserta PKH yang harus dilakukan apabila ingin mendapatkan bantuan PKH yaitu menghadiri proses pembelajaran minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Pada pemenuhan kebutuhan sekolah secara tidak langsung seperti membeli beras, membeli obat, membeli baju, kecukupan pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak seluruhnya untuk berfoya-foya menikmati bantuan PKH melainkan hal ini digunakan sebagai penunjang kebutuhan langsung untuk sekolah. Prioritas utama tetap untuk pendidikan tetapi dalam hal pemenuhan tersebut ada pula kebutuhan yang menunjang dalam memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam hal pendidikan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu (1) Dalam hal ini penulis menyarankan agar peran pendamping PKH terhadap pemberdayaan masyarakat miskin perlu ditingkatkan yaitu dengan mempersiapkan pendamping yang lebih mempunyai inovasi dan ide-ide baru dalam memperkecil penyalahgunaan dana yang harusnya digunakan untuk pendidikan, sehingga program ini dapat berjalan dengan lebih baik serta berkelanjutan. (2) Tak henti-hentinya diadakan pembinaan dan perkumpulan antar pendamping dengan peserta PKH yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penerima bantuan PKH dan agar pendamping dan peserta PKH menjadi lebih dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. ALFABEACahyat Ade, Gonner Christian, Hang Michaela. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: Cifor
- Departemen Sosial RI. 2009. *Pedoman Umum PKH 2009*. Jakarta: Tim Penyusun Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian dan Lembaga

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. Mari Kita Mengenal Program PKH.

Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang.(Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharto Edu. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: API

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas

Wahab, Sholichin Abdul. 1997. Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang. Banyumedia

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

<http://birohukum.jogjaprovo.go.id/index.php/berita/provinsi-diy/469-pendanaan-pendidikan>. Diakses pada 12 April 2014

http://www.academia.edu/3596021/Strategi_Pengentasan_Kemiskinan_Partisipatif. Diakses pada 12 april 2014

<http://www.ginandjar.com/public/09PemberdayaanMasyarakat.pdf>. Diakses pada 15 Maret 2014

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=992>. Diakses pada 15 Maret 2014